

TESIS

**TINJAUAN YURIDIS DALAM PEMBERIAN KREDIT TANPA
AGUNAN DAN HUBUNGANNYA DENGAN PENERAPAN
PRINSIP KEHATI-HATIAN BANK UMUM**



**Disusun Oleh:
CHIANG INDRA
NIM: 12113024**

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS NAROTAMA
SURABAYA**

2016

ABSTRAK

Perubahan regulasi Undang-Undang Perbankan No. 14 tahun 1967 melalui terbitnya Undang-Undang Perbankan No. 7 tahun 1992 yang kemudian diperbaharui dengan Undang-Undang Perbankan No. 10 tahun 1998, membuat suatu perubahan yang besar mengenai ketentuan jaminan. Pengertian jaminan mengalami perubahan dan keharusan untuk meminta agunan sudah tidak berlaku lagi. Dengan adanya perubahan regulasi tersebut maka dimungkinkan sebuah bank tidak diharuskan meminta agunan dalam pemberian kreditnya.

Persaingan bisnis bank yang bertambah ketat dengan masuknya bank-bank swasta asing dan bertambahnya jumlah bank lokal yang bersama-sama mengejar target profit yang kian besar dari waktu ke waktu membuat bank harus melakukan terobosan-terobosan baru yang dapat membuka peluang usahanya. Kredit tanpa agunan (KTA) yang muncul setelah adanya regulasi perbankan UU No 7 tahun 1992 memberi peluang dan janji bagi calon debitur menginginkan proses kredit yang cepat, mudah dengan tanpa dipusingkan dengan kendala agunan. Pihak bank tentu saja harus memberi perhatian lebih terhadap bisnis ini yang membuat resiko kredit bank semakin besar. Untuk meminimalisir resiko kredit tersebut maka pihak bank harus menerapkan prinsip kehati-hatian.

Kata kunci: peraturan perundang-undangan, kredit tanpa agunan, prinsip kehati-hatian.

ABSTRACT

Changes in regulation of the Act No. 14 of 1967 concerning banking through the issuance of Law No. 7 1992 which was renewed by Law No. 10 of 1998 on banking, making a large change regarding guarantee coverage. Understanding guarantee change and the need to ask for collateral is no longer valid. With the change in the regulations it is possible a bank is not required to ask for collateral in granting credit.

Competition increased bank business strictly with the entry of foreign private banks and the growing number of local banks jointly pursue an increasingly large profit targets from time to time make the bank must perform new breakthroughs that can unlock their business opportunities. Unsecured loans (KTA), which emerged after the banking regulations of Law No. 7 of 1992 gave opportunity and promise for potential credit borrowers want the credit process fast, easy with no mess around with the constraint of collateral. The bank of course have to pay more attention to these businesses that makes the credit risk of banks getting bigger. To minimize the credit risk, the bank should apply the principle of prudence.

Keywords: legislation, unsecured loans, principle of prudence



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING DAN KAPRODI	ii
LEMBAR PENGESAHAN PANITIA PENGUJI	iii
SURAT PERNYATAAN	iv
MOTTO	v
KATA PENGANTAR.....	vi
RINGKASAN.....	ix
ABSTRAK	xi
ABSTRACT.....	xii
DAFTAR ISI	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
1. Latar Belakang	1
2. Rumusan Masalah.....	6
3. Tujuan Penelitian	6
4. Manfaat Penelitian	7
5. Tinjauan Pustaka	8
5.1. Pembangunan Hukum Nasional Dalam Usaha Mendukung Tujuan dan Cita-Cita Bangsa Indonesia.....	8
5.2. Fungsi Lembaga Perbankan Dalam Mendukung Pembangunan Nasional	11
5.3. Prinsip Kehati-hatian Dalam Pemberian Kredit Bank.....	14
5.4. Perlindungan Hukum Dalam Pemberian Kredit	17
5.5. Peran Agunan Dalam Pemberian Kredit	21
6. Metode Penelitian.....	24
6.1. Tipe Penelitian	24

6.2. Metode Pendekatan	24
6.3. Jenis Bahan Hukum	25
6.4. Sumber Bahan Hukum	26
7. Sistematika Penulisan ..	26
 BAB II LATAR BELAKANG PERUBAHAN UNDANG-UNDANG NO. 14 TAHUN 1967 MENJADI UNDANG-UNDANG NO.7 TAHUN 1992 BESERTA PERUBAHANNYA UNDANG-UNDANG PERBANKAN NO. 10 TAHUN 1998	
1. Tinjauan Yuridis Pemberian Kredit	28
1.1. Ketentuan Jaminan Berdasarkan Undang-Undang Perbankan No. 14 Tahun 1967.....	34
1.2. Ketentuan Jaminan Berdasarkan Undang-Undang Perbankan No. 7 Tahun 1992	36
1.3. Ketentuan Jaminan Berdasarkan Undang-Undang Perbankan No. 10 Tahun 1998	37
2. Latar Belakang Perubahan Undang-Undang Perbankan No.14 Tahun 1967 Menjadi Undang-Undang Perbankan No. 7 Tahun 1992 Beserta Perubahannya Undang-Undang Perbankan No.10 Tahun 1998	40
 BAB III PENERAPAN PRINSIP KEHATIAN-HATIAN PADA KREDIT TANPA AGUNAN BANK UMUM	
1. Bentuk dan Penggunaan Kredit Tanpa Agunan (KTA).....	48
2. Penerapan Prinsip Kehati-hatian Dalam Pemberian KTA.....	57
 BAB IV PENUTUP	
1. Kesimpulan	106
2. Saran	107
 DAFTAR BACAAN.....	109

BAB IV PENUTUP

1. Kesimpulan

- a. Latar belakang dari perubahan UU No. 14 tahun 1967 menjadi Undang undang Perbankan No. 7 tahun 1992 yang berhubungan dengan pemberian kredit tanpa agunan dilandasi oleh beberapa hal, terutama agar bank-bank di Indonesia lebih dapat menjalankan fungsinya sebagai suatu wahana yang dapat menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat secara efektif dan efisien, yang dapat menjangkau semua lapisan masyarakat tidak terkecuali pelayanan perkreditan yang diperuntukkan bagi golongan ekonomi lemah/pengusaha kecil yang banyak terkendala oleh masalah agunan. Dengan adanya perubahan regulasi tersebut mereka dapat memiliki akses untuk mendapatkan kredit sehingga dapat mendukung pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya ke arah peningkatan taraf hidup rakyat banyak yang berasaskan demokrasi ekonomi dan semakin dihadapkan pada tantangan perkembangan perekonomian internasional.
- b. Kredit tanpa agunan mengandung resiko yang besar bagi bank karena tanpa disertai dengan jaminan material/agunan. Oleh karena itu diperlukan penerapan prinsip ke hati-hatian dengan melakukan serangkaian analisa pada setiap tahap proses kredit, dari proses permohonan, proses analisa, proses persetujuan, sampai pelunasan kredit serta dokumentasi pengarsipannya. Analisa yang mendalam terhadap debitur akan menyaring seminimal mungkin calon debitur yang berpotensi bermasalah sedangkan penerapan prinsip kehati-hatian pada setiap proses atau tahapan kredit akan menutup segala celah yang dapat memungkinkan debitur menghindari kewajibannya ketika sudah bermasalah.

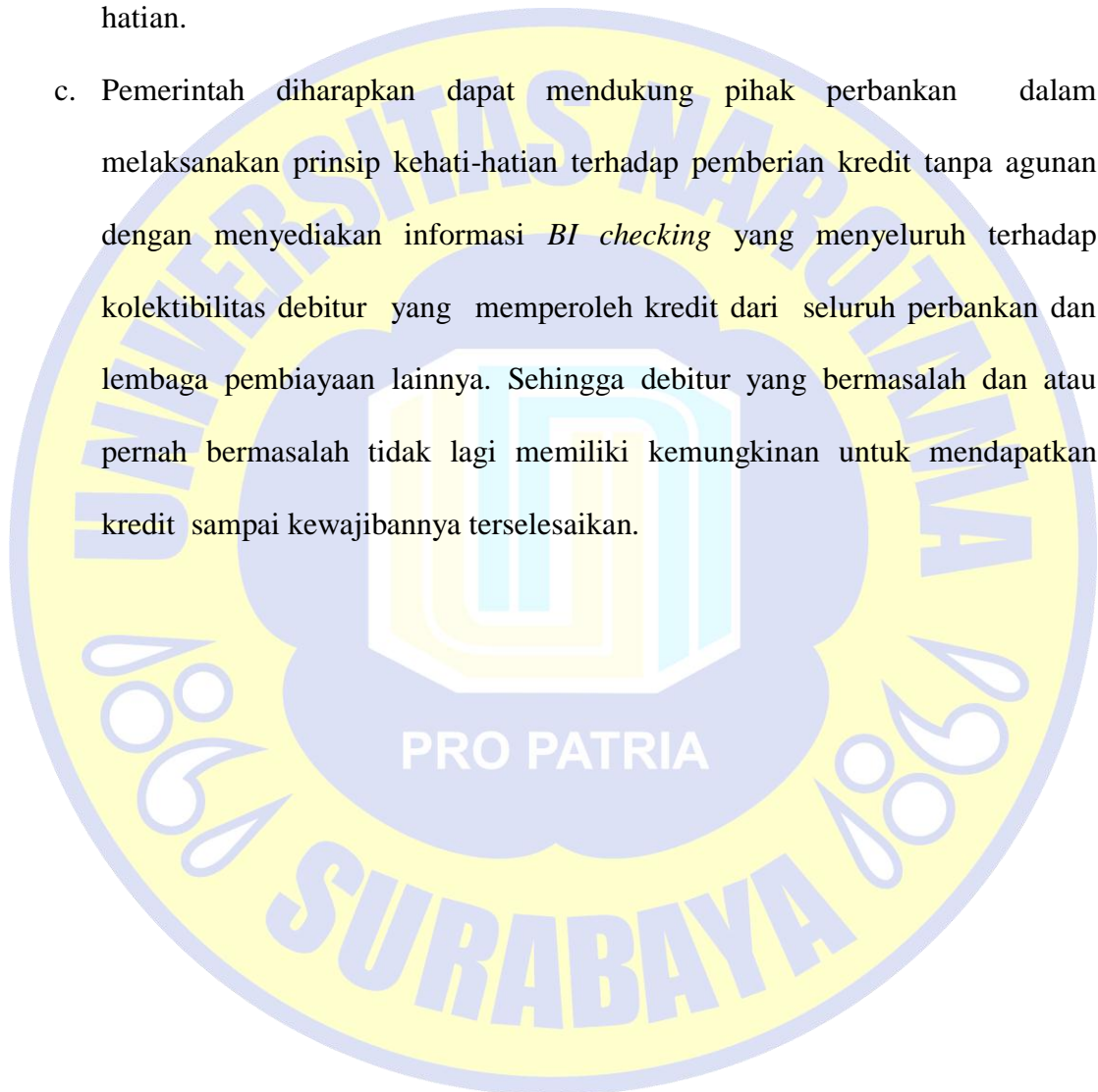
- c. Ditengah persaingan yang ketat dalam pemberian KTA, pihak pemerintah harus tetap memonitor pelaksanaan dan kebijakan bank, agar tetap mematuhi seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku secara konsisten untuk mencegah bank terhindar dari praktek-praktek perbankan yang tidak sehat dan jauh dari prinsip kehati-hatian. Selain itu pemerintah harus juga mendukung pihak perbankan agar dapat terhindar dari resiko kredit yang di sebabkan tidak adanya itikad baik dari debitur untuk menyelesaikan kewajibannya atau mengalihkan kewajibannya kepihak lain.

2. Saran

- a. Produk KTA merupakan suatu contoh produk yang muncul dari adanya suatu kesempatan dari perubahan regulasi perbankan agar bank-bank di Indonesia kembali kepada definisinya untuk menjalankan fungsinya sebagai suatu wahana yang dapat menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat dan mendukung pembangunan guna peningkatan taraf hidup rakyat banyak. Oleh karena itu hendaknya pihak perbankan pemerintah dan swasta nasional di Indonesia tidak saja menggunakan produk ini hanya sebagai sarana untuk mengejar keuntungan tetapi juga berusaha untuk melakukan perluasan akses kredit terutama bagi golongan ekonomi lemah/pengusaha kecil yang kadangkala terkendala dengan agunan serta juga melakukan pembinaan, bantuan dan pemberdayaan kepada masyarakat ekonomi lemah/pengusaha kecil tersebut agar dapat bertumbuh semakin kuat dan berkembang sehingga dapat turut berpartisipasi dalam pembangunan nasional yang berkelanjutan.
- b. Pemberian produk KTA menuntut suatu perubahan sikap dari perilaku dari perbankan di Indonesia yang dalam pemberian kreditnya sebelumnya aman dalam lindungan regulasi jaminan yang berbentuk agunan. Oleh karena itu

perlu dilakukan perubahan dan pengembangan kebijakan pemberian kredit dari perbankan itu sendiri beserta sumber daya manusianya agar lebih mampu meningkatkan daya inovasi dan analisisnya secara efisien dan efektif secara profesional dan beritikad baik dengan berlandaskan pada peraturan dan perundang-undangan yang berlaku sebagai penerapan dari prinsip kehati-hatian.

- c. Pemerintah diharapkan dapat mendukung pihak perbankan dalam melaksanakan prinsip kehati-hatian terhadap pemberian kredit tanpa agunan dengan menyediakan informasi *BI checking* yang menyeluruh terhadap kolektibilitas debitur yang memperoleh kredit dari seluruh perbankan dan lembaga pembiayaan lainnya. Sehingga debitur yang bermasalah dan atau pernah bermasalah tidak lagi memiliki kemungkinan untuk mendapatkan kredit sampai kewajibannya terselesaikan.



DAFTAR BACAAN

BUKU-BUKU

- Abdulkadir Muhammad.. Lembaga Keuangan dan Pembiayaan, PT Citra Aditya Bakti. Bandung, 2000.
- Firdaus,HR, Ariyanti, *Manajemen Perkreditan Bank Umum: Teori, Masalah, Kebijakan dan Aplikasinya Lengkap dengan Analisis Kredit*, Alfabeta, Bandung, 2009.
- Gatot Supramono, *Perbankan dan Masalah Kredit*, Cet. 2 Edisi Revisi, Djambatan, Jakarta, 1997.
- Harsono, B., *Beberapa Analisa Tentang Hukum Agraria*, Esa Study Club, Jakarta, 1979
- Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, cet.4, Kencana Prenada, Jakarta, 2008.
- H.R. Daeng Naja, *Hukum Kredit Dan Bank Garansi*, Cetakan pertama, PT. Citra Aditya Bakti. Bandung , 2005.
- H. S. Salim, *Hukum Jaminan Di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004.
- Iswi Hariyani dan R. Serfianto D.P, *Bebas Jeratan Utang Piutang*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2010.
- Kasmir, *Manajemen Perbankan*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2007.
- Kuncoro, Mudrajad dan Suhardjono. 2002. *Manajemen Perbankan Teori dan Aplikasinya*. Yogyakarta: BPFE.
- Muljono, Teguh Pudjo, *Manajemen Perkreditan*, Rineka Cipta, Yogyakarta, 2001
-, *Manajemen Perkreditan Bagi Bank Komersial*. Edisi Ketiga, BPFE. Yogyakarta, 1996
- M. Bahsan, *Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia* (PT.Raja Grasindo Persada, Jakarta, 2007) Hal. 50
- Philipus M. Hadjon dan I Putu Pasek Bagiartha, *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Atas Pemberlakuan Kontrak Baku Ditinjau Dari Perspektif Hukum Perjanjian*, Tesis Magister Hukum Universitas Mataram, 2011.
- Rachmadi Usman, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama. Jakarta, 2001.

- Rachmat Firdaus, Maya Ariyanti. *Manajemen Perkreditan Bank Umum*, Alfabeta, Bandung, 2003
- R. Subekti, *Aneka Perjanjian*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995
- Sentosa Sembiring, *Hukum Perbankan*, Cet. 2, Mandar Manju, Bandung, 2008.
- Shidarta, *Karakteristik Penalaran Hukum Dalam Konteks Ke-Indonesiaan*, CV. Utomo, Jakarta, 2006.
- Sinungan, Muchdarsyah, *Manajemen Dana Bank*, Bumi Aksara, Jakarta, 2000
- Soedarjanto Imam Syakir, *Dasar-dasar Moneter dan Perbankan Bagian Dua*, Surabaya, 1983.
- Sofwan, S.S.M., *Hukum Jaminan di Indonesia Pokok-Pokok Hukum Jaminan dan Jaminan Perorangan*, BPHN Dephan, Jakarta, 1980.
- Subekti, *Hukum Perjanjian*, Cet.22, Intermasa, Jakarta, 2008.
- Subekti dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Cet. 38, Pradnya Paramita, Jakarta, 2007.
- Syahril Sabirin, *Upaya Keluar dari Krisis Ekonomi dan Moneter*, Orasi Ilmiah Acara Wisuda Sarjana Universitas Muhammadiyah Sumatra Barat, Padang, tanggal 29 September 2001.
- Tan Kamelo, *Hukum Jaminan Fidusia*, PT. Alumni, Bandung, 2006.
- Try Widoyono, *Aspek Hukum Operasional Transaksi Produk Perbankan Di Indonesia, Simpanan, Jasa dan Kredit*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2006.
- Widjanarto, *Hukum dan Ketentuan Perbankan di Indonesia*, PT Balai Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 1993.

KORAN DAN TABLOID

- Anonim, *Bunga KUR Bisa Berubah*, Kompas, tanggal 26 Mei 2008.
- Anonim, *Perbankan Tidak Boleh Meminta Jaminan*, Kompas, 7 Juni 2008
- Arthur Gideon dan Sanny Cicilia Simbolon, *Jorjoran Mendongkrak Kredit Tanpa Agunan*, Koran Kontan, Edisi : 18,. 24-01-2010
- Dwi Tupani, *Aturan Kredit UMKM Bertahap*, Media Indonesia, 17 Desember 2012

Farodlilah Muquddam , *Kredit Tanpa Agunan - Margin Masih Gemuk*, Bisnis Indonesia, 19 April 2014

Gunanto, *Kredit Usaha rakyat Diluncurkan*, Tempo Interaktif, 5 November 2007

Nina Dwiantika, *Bank Asing Merajai Kredit Tanpa Agunan*, Koran Kontan, 28 Februari 2013

Safir Senduk, *Berkenalan dengan Kredit Bank*, Tabloid Nova No. 684/XIV,/ 2000

Tengku Dahril, *Kredit Usaha Rakyat*, Riau Pos, 16 Maret 2008

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Perbankan No. 14 tahun 1967

Undang-Undang Perbankan No. 7 tahun 1992

Undang-Undang Perbankan No. 10 tahun 1998

Peraturan Menteri Keuangan No. 135/PMK.05/2008

Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 14/22/PBI/2012

Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 27/162/KE/DIR tanggal 31 Maret 1995

Surat Keputusan Dirut Bank Indonesia Nomor 23/69/Kep/Dir Tanggal 28 Pebruari 1991